

RPJMD KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2012-2017
PERENCANAAN STRATEGIS

VISI : Kota Lhokseumawe yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Sebagai Wujud MoU Helsinki

MISI : 1. Menjalankan tata kelola Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang amanah dengan mengimplementasikan UUPA

2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat
3. Memperkuat struktur sosial ekonomi, peninhkatan nilai tambah produksi masyarakat serta optimalisasi pemanfaatan SDA
4. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan
5. Melaksanakan pembangunan infrastuktur dan energi Kota Lhokseumawe yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan.

NO	TUJUAN	SASARAN		Capaian Tujuan dan Sasaran		Sumber Data
		Uraian	Indikator Kinerja	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Tata Kelola dan Kualitas Pemerintahan Daerah yang Baik	1.1 Terwujudnya implementasi UUPA secara cepat dan akurat melalui implementasi berbagai turunan UUPA yang mengikat dalam upaya pencapaian keutuhan, perdamaian abadi, dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan;	<ul style="list-style-type: none"> - Lahirnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Bina Kadarkum - Sosialisasi Ranham - Frekuensi kerja sama di bidang hukum - Publikasi Peraturan Perundang-Undangan - Aset tanah negara dan bangunan milik Pemko Lhokseumawe yang terinventarisir - Terwujudnya penataan wilayah dan tapal batas gampong 	1.1.1 Mensosialisasikan dan melaksanakan UUPA dan turunan peraturan pelaksanaan UUPA sebagai konsekuensi dari hasil MoU Helsinki; 1.1.2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	1 penataan peraturan perundang-undangan 2 Penataan daerah otonomi baru 3 Otonomi Khusus 4 Penataan perundang-undangan Peningkatan Masyarakat dalam membangun desa	

			<ul style="list-style-type: none"> - Penegakan dan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah - Penguatan lembaga peradilan adat gampong 	<p>1.1.3 Meningkatkan ketertiban, pembinaan dan pengembangan politik masyarakat yang berwawasan kebangsaan dalam tatanan pengelolaan pemerintahan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> 5 pemberdayaan masyarakat Untuk menjaga ketertiban dan keamanan 6 Pendidikan politik masyarakat 7 Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 8 Peningkatan Pemberantasan Pekat 9 Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 10 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 11 Pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal 12 Pengembangan wawasan kebangsaan 13 Dukungan kelancaran pengawasan Pemilu 	
		<p>1.2 Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang kuat dengan mengoptimalkan pelayanan publik,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase PNS yang menduduki jabatan struktural yang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan - Persentase PNS yang berprestasi 	<p>1.2.1 Mengkaji ulang struktur organisasi tata kerja (SOTK) Pemerintah Kota Lhokseumawe yang sesuai kebutuhan beban tugas dan fungsinya;</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2 Peningkatan Displin Aparatur 	

		<p>mengedepankan kualitas kerja dan profesionalisme demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin dan pemberhentian - Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk - Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk - Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan - Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Lhokseumawe - Kepemilikan KTP - Penerapan KTP Nasional berbasis NIK - Rasio bayi berakte lahir - Jumlah perpustakaan - Lamanya proses perijinan 	<p>1.2.2 Meningkatkan sumberdaya aparatur dan kedisiplinan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan;</p> <p>1.2.3 Meningkatkan pelayanan perizinan terpadu;</p> <p>1.2.4 Menyediakan Data Base Pemerintahan dan Peningkatan Informasi Publik Melalui Pengembangan e-Iptek (Simpeg dll)</p> <p>1.2.5 Melaksanakan tertib administrasi perkantoran dan terpenuhinya fasilitas kebutuhan kantor</p>	<p>3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>4 Pembinaan Aparatur dan pemerintahan desa/kelurahan/kecamatan</p> <p>5 Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH</p> <p>6 Pendidikan Kedinasan</p> <p>7 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</p> <p>8 Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>9 Penataan Administrasi Kependudukan</p> <p>10 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>11 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</p> <p>12 Kerjasama Informasi dengan Mass Media</p> <p>13 Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan</p>	
--	--	--	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota - LPPD - LKJIP - Ketersediaan Rancangan Qanun dan Perwal tentang Organisasi Perangkat Daerah - Buku " Kota Lhokseumawe dalam Angka - Buku " PDRB Kota Lhokseumawe 	<p>1.2.6 Pengembangan perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan serta penyediaan pusat data dan informasi berbasis e-planning</p> <p>1.2.7 Fasilitasi penguatan pengawasan keuangan daerah dan pembinaan administrasi anggaran daerah secara transparan dan akuntabel</p> <p>1.2.8 Meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan Kpta Lhokseumawe untuk memperoleh status penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</p> <p>1.2.9 Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD</p>	<p>14 Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>15 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>16 Peringatan Hari-hari besar</p> <p>17 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan</p> <p>18 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kel (Khusus Kec)</p> <p>19 Penyusunan perencanaan satuan kerja perangkat daerah</p> <p>20 Pengembangan Data/Informasi</p> <p>21 Perencanaan Pembangunan Daerah</p>	
--	--	--	---	--	--	--

2	Mewujudkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat	<p>2.1 Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan;</p> <p>2.2 Terwujudnya masyarakat Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan memiliki karakter islami;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah grup kesenian - Penyelenggaraan festival seni dan budaya - Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan - Kegiatan Pameran Kota Lhokseumawe - Rasio ketersediaan Dayah dan Santri - Rasio ketersediaan Tengku/Guru dan Santri - Jumlah sekolah Agama Negeri/Swasta - Jumlah Pondok Pesantren 	<p>2.1.1 Menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi pemahaman sejarah dan nilai budaya Aceh;</p> <p>2.1.2 Pengembangan nilai budaya Aceh dan menyebarluaskan informasi sejarah kepada masyarakat</p> <p>2.2.1 Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur pelaksana nilai-nilai dinul islam dan peran serta ulama dalam penyelenggaraan pemerintahan;</p> <p>2.2.2 Menyemarakkan syiar islam</p> <p>2.2.3 Mensosialisasikan Qanun dan aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan 2 Pengembangan nilai budaya 3 Pengelolaan kekayaan budaya 4 Pengelolaan keragaman budaya 5 Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 6 Penguatan lembaga adat 7 Pembinaan keagamaan dan adat 8 Pembinaan kepemudaan 9 Peningkatan pelayanan kehidupan beragama 	
---	---	--	---	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Rasio ketersediaan balai pengajian di desa - Persentase peningkatan kualitas Qari dan Qariah Kota - Pembinaan terhadap Hafidz&Hafidzah Kota - Peningkatan Syiar Islam melalui pelatihan keagamaan 	2.2.4 Peningkatan kapasitas instansi dan lembaga terkait dalam mendukung penerapan agama bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 10 Peningkatan pelaksanaan syariat islam dan peran ulama 11 Peningkatan pelayanan kehidupan beragama (khusus syariat islam) 12 Operasional MPU dan DKU 13 Operasional Baitul Mal 14 Peningkatan Bidang Keistimewaan Aceh dan Kesra 	
3	Memperkuat stuktur ekonomi, ketahanan pangan, dan penanggulangan kemiskinan	3.1 Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dan kemandirian keuangan daerah untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan PDRB - Migas - Non Migas 	3.1.1 Menumbuh kembangkan komoditas unggulan daerah yang sesuai dengan agrosistem wilayah dalam upaya menciptakan mata pencaharian tetap kepada masyarakat dengan skala usaha menguntungkan;	<ul style="list-style-type: none"> 1 Penyusunan Studi Kelayakan dan Investigasi Potensi Daerah 2 Program Khusus 3 Pengembangan dan penataan sistem perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran pendapatan belanja daerah 	

			<ul style="list-style-type: none"> - Laju Inflasi Kota Lhokseumawe PDRB per kapita - Migas - Non Migas - Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Migas - Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Non Migas - Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Migas - Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Non Migas 	<p>3.1.2 Pemanfaatan dan pengelolaan sektor jasa, industri, perdagangan dan pariwisata;</p> <p>3.1.3 Optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah hinterland dan status Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;</p> <p>3.1.4 Pengembangan kawasan sentra industri;</p> <p>3.1.5 Peningkatan keamanan dan kepastian hukum untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif;</p> <p>3.1.6 Peningkatan nilai tambah dan daya saing agro industri secara berkelanjutan dan berkeadilan;</p>	<p>4 Perencanaan pembangunan wilayah strategi dan cepat tumbuh</p> <p>5 Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</p> <p>6 Pengembangan data/informasi/statistik daerah</p> <p>7 Perencanaan pengembangan wilayah perbatasan</p> <p>8 Kerjasama Pembangunan</p> <p>9 Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah</p> <p>10 Akuntansi Keuangan daerah</p> <p>11 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</p>	
--	--	--	--	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Migas - Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Non Migas - Populasi koperasi - Persentase koperasi aktif 	<p>3.1.7 Peningkatan SDM dunia usaha industri kecil dan menengah</p>	<p>12 Penataan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</p> <p>13 Peningkatan dan pengembangan pengelola keuangan daerah</p> <p>14 Peningkatan efektifitas pengelolaan kekayaan daerah</p> <p>15 Pembinaan dan fasilitas pengelolaan kekayaan daerah</p> <p>16 Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa</p> <p>17 Peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan</p>	
		<p>3.2 Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dan pemberdayaan kemandirian masyarakat dengan perluasan lapangan usaha dan penyediaan fasilitas usaha mikro;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe - Rumah Tangga pengguna air bersih - Rumah Tangga pengguna listrik - Rumah Tangga ber-Sanitasi 	<p>3.2.1 Memberdayakan UMKM yang telah ada dan membina koperasi secara profesional;</p>	<p>18 Peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan daerah</p> <p>19 Peningkatan kesejahteraan petani</p> <p>20 Pengembangan dagang dan industri kecil dan menengah</p> <p>21 Peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi</p>	

			<ul style="list-style-type: none"> - Angka partisipasi angkatan kerja - Rasio penduduk yang bekerja (persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan) - Tingkat pengangguran terbuka - Keselamatan dan perlindungan - Jumlah usaha mikro dan kecil - Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK - PKK Aktif 	<p>3.2.2 Mengembangkan keahlian daya saing tenaga kerja yang memiliki standarisasi dan jiwa kewirausahaan dan akses kesempatan kerja;</p> <p>3.2.3 Pengembangan industri dan pariwisata berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi</p> <p>3.2.4 Pemberian subsidi bagi masyarakat miskin dan bantuan usaha mikro</p> <p>3.2.5 Perlindungan sosial bagi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat</p>	<p>22 Pengembangan Pemasaran Pariwisata</p> <p>23 Pengembangan Destinasi Pariwisata</p> <p>24 Pengembangan Kemitraan</p> <p>25 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</p> <p>26 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>27 Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial</p> <p>28 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</p> <p>29 Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan</p> <p>30 Identifikasi bahan baku agro industry</p> <p>31 Pembangunan pergudangan penunjang ekspor impor</p> <p>32 Keluarga Berencana</p>	
--	--	--	---	--	---	--

				3.2.6	Peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan	33 Kesehatan Reproduksi Remaja	
						34 Pelayanan Kontrasepsi	
				3.2.7	Pemberian subsidi bagi masyarakat miskin dan bantuan usaha mikro	35 Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	
						36 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial	
						37 Pembinaan Anak Terlantar	
		3.3 Pengembangan sektor pertanian dan meningkatnya luasan areal baru lahan pertanian, perikanan dan peternakan serta produktivitasnya yang berbasis komoditi unggulan;	- Produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya pertahun	3.3.1	Perluasan areal pertanian serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar	38 Pembinaan Para Penyandang Cacat da trauma	
			Padi			39 Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	
			Jagung			40 Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	
			Ubi kayu			41 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
			- Produksi tanaman perkebunan per tahun	3.3.2	Peningkatan pengolahan hasil pertanian, budidaya perikanan dan peternakan yang berkelanjutan	42 Peningkatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	
			Kelapa			43 Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	

			Pinang		44	Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	
			Kelapa Sawit	3.3.3	Pengendalian lingkungan dengan pemanfaatan sumberdaya alam	45	Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan
			Kakao			46	Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan
			- Populasi ternak per Tahun			47	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah
			Sapi			48	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
			Kambing			49	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
			Ayam Broiler			50	Pengembangan dan pembinaan Koperasi dan UKM
			Itik			51	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
			- Produksi daging per Tahun			52	Peningkatan kesempatan kerja

			Sapi		53	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	
			Kambing		54	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan	
			Ayam Broiler		55	Peningkatan mutu industri	
			Itik		56	Penataan struktur industri	
			- Produksi perikanan per Tahun		57	Pengembangan dan pembinaan DEKRANASDA	
			Teri		58	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	
			Tuna		59	Peningkatan produksi Pertanian/ Perkebunan	
			Belanak		60	Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak	
			Kakap		61	Peningkatan pemasaran hasil produk peternakan	
			- Regulasi ketahanan pangan		62	Pengembangan budidaya perikanan	
			- Jumlah tenaga penyuluh (pertanian, perkebunan, dan peternakan + THL-TBPP)		63	Pengembangan perikanan tangkap	

		3.4 Meningkatnya pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penduduk diatas garis kemiskinan - Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah - Jenis dan jumlah bank dan cabang - Jenis, kelas, dan jumlah restoran - Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel - Laju pertumbuhan ekonomi 	3.4.1 Pengembangan investasi swasta, baik yang bersumber dari pengusaha lokal yang ada di daerah, atau pengusaha luar daerah bahkan luar negeri untuk berinvestasi melalui pembentukan kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat	<p>64 Peningkatan kesejahteraan nelayan</p> <p>65 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi</p> <p>66 Peningkatan produksi hasil peternakan</p> <p>67 Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan</p> <p>68 Peningkatan peran perempuan di perdesaan</p> <p>69 Peningkatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat</p>	
4	Mewujudkan wisata yang berkonsep islami di semua sektor pariwisata	4.1 Meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan PAD daerah melalui sektor pariwisata;	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah investor/perusahaan (PMDN/PMA) - Jumlah surat kabar lokal - Website milik pemerintah 	4.1.1 meningkatkan sarana prasarana untuk pembangunan pariwisata daerah	<p>1 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi</p> <p>2 Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi</p> <p>3 Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah</p>	

			<ul style="list-style-type: none"> - Pameran/Expo - Kunjungan wisata - kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Migas - kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Non-Migas 		4 Peningkatan dan pengembangan ekonomi pembangunan	
5	Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang sesuai dengan nilai-nilai azas keislaman	5.1 Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan pengembangan mutu pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, dan pendidikan tinggi dalam menjawab tantangan global dan kebutuhan ketenagakerjaan;	<ul style="list-style-type: none"> - Angka melek huruf - Angka parsitipasi murni SD/MI/Paket A SMP/MTS/Paket B SM/MA/Paket C - Angka pendidikan yang ditamatkan Tidak/belum tamat SD 	5.1.1 Peningkatan kualitas layanan pendidikan formal dan non formal 5.1.2 Pendidikan Wajib Belajar menjadi 12 tahun 5.1.4 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta jaringannya	1 Pendidikan Anak Usia Dini 2 Pendidikan Menengah 3 Pendidikan Non Formal 4 Pendidikan Luar Biasa 5 Perencanaan, pengawasan dan peningkatan mutu MPD 6 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 7 Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	

			<p>SD Sederajat</p> <p>SLTP Sederajat</p> <p>SLTA</p> <p>Perguruan Tinggi</p> <p>- Pendidikan Dasar</p> <p>- Angka partisipasi sekolah SD/MI</p> <p>- Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI</p> <p>- Rasio guru SD/MI terhadap murid</p> <p>- Pendidikan Menengah</p> <p>Angka partisipasi sekolah SMP/MTs</p> <p>Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs</p> <p>Rasio guru SMP/MTs terhadap murid</p>	<p>5.1.5 Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan</p>	<p>8 Manajemen pelayanan pendidikan</p> <p>9 Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda</p> <p>10 Peningkatan peran serta kepemudaan</p> <p>11 Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</p> <p>12 Upaya penyalahgunaan narkoba</p> <p>13 Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga</p> <p>14 Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga</p>	
--	--	--	--	---	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Angka Putus Sekolah <li style="padding-left: 20px;">Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI <li style="padding-left: 20px;">Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS <li style="padding-left: 20px;">Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA - Angka Kelulusan <li style="padding-left: 20px;">Angka Kelulusan (AL) SD/MI <li style="padding-left: 20px;">Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs <li style="padding-left: 20px;">Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA - Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV - Rasio lulusan S1/S2/S3 - Fasilitas Pendidikan <li style="padding-left: 20px;">Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi ruang kelas baik <li style="padding-left: 20px;">Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi ruang kelas baik <li style="padding-left: 20px;">Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi ruang kelas baik - Jumlah Universitas/Sekolah Tinggi 			
--	--	--	--	--	--	--

		5.4 Terciptanya SDM pada bidang Pemuda dan Olahraga;	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah organisasi pemuda - Jumlah organisasi olahraga 	5.4.1 Peningkatan SDM melalui pembinaan pemuda dan olahraga		
6	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Lhokseumawe	6.1 Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas dan kesehatan masyarakat yang optimal;	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio posyandu per satuan balita - Rasio puskesmas per satuan penduduk - Rasio pustu per satuan penduduk - Rasio dokter per satuan penduduk - Rasio tenaga medis per satuan penduduk - Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 	<p>6.1.1 Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas lembaga kesehatan;</p> <p>6.1.2 Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan</p> <p>6.1.3 Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta jaringannya</p> <p>6.1.4 Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyarakat;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Evaluasi pengendalian dan pelaporan 2 Pengawasan Obat dan Makanan 3 Standarisasi pelayanan kesehatan 4 pelayanan kesehatan penduduk miskin 5 Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 6 Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 7 Obat dan perbekalan kesehatan 8 Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya 	

			<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan - Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB baru - Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD - Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin - Cakupan kunjungan bayi Angka kelangsungan hidup bayi - Angka usia harapan hidup - Cakupan peserta KB aktif - Rasio KDRT 	<p>6.1.5 peningkatan kepedulian kesehatan masyarakat;</p> <p>6.1.6 Peningkatan kesehatan bagi ibu dan anak serta lansia</p>	<p>9 Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata</p> <p>10 Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata</p> <p>11 Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat</p> <p>12 Perbaikan gizi masyarakat</p> <p>13 Upaya kesehatan masyarakat</p> <p>14 Pengembangan lingkungan sehat</p> <p>15 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular</p> <p>16 Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</p> <p>17 Peningkatan pelayanan kesehatan lansia</p> <p>18 Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan Anak</p>	
--	--	--	---	---	--	--

7	Mewujudkan integrasi infrastruktur dan energi untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan	7.1 Terciptanya integrasi infrastruktur di berbagai sektor pembangunan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan tata ruang dan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kebutuhan, manfaat, potensi dan daya dukung lingkungan yang terpadu;	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA - Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD - Ketersediaan data rupa bumi wilayah Pemko Lhokseumawe - Lingkungan pemukiman kumuh - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik - Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat - Luas irigasi Kota dalam kondisi baik - Persentase penanganan sampah 	<p>7.1.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur;</p> <p>7.1.2 Peningkatan akses kebutuhan penduduk terhadap air minum, pelayanan pengelolaan persampahan dan air limbah dan sarana lingkungan permukiman;</p> <p>7.1.3 Penanganan jumlah rumah yang tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh;</p> <p>7.1.4 Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, dermaga, saluran irigasi, air baku, pengendalian banjir dan pengamanan daerah aliran sungai dan pantai;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pembangunan jalan dan jembatan 2 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 4 Pembangunan sarana dan prasarana umum 5 Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana umum 6 Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga 7 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 8 Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan 9 Penerapan pembangunan berbasis tata ruang dan zoning regulation 	
---	---	---	--	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk - Luas wilayah industri - Luas wilayah banjir 	<p>7.1.5 Menangani kondisi kejadian-kejadian pra bencana, bencana dan pasca bencana;</p> <p>7.1.6 Penyusunan perencanaan, dokumentasi dan pengendalian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah/kota</p>	<p>10 Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</p> <p>11 Peningkatan keindahan dan keserasian Kota</p> <p>12 Normalisasi jaringan air limbah</p> <p>13 Lingkungan sehat perumahan</p> <p>14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p> <p>15 Pengembangan Kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</p> <p>16 Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh</p> <p>17 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</p> <p>18 Pembangunan Sarana dan prasarana perhubungan</p> <p>19 Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</p>	
		7.2 Terciptanya manajemen pelayanan pembangunan;	- Rasio ijin trayek	7.2.1 Peningkatan manajemen pelayanan pembangunan		

			<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis - Kepemilikan KIR angkutan umum - Pemasangan rambu-rambu - Lama proses perijinan - Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha - Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan 		<p>20 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ</p> <p>21 Pengembangan sarana penunjang transportasi</p> <p>22 Pencegahan dini dan penganggulangan korban bencana alam</p> <p>23 Pengendalian Kebakaran Hutan</p> <p>24 Perencanaan Tata Ruang</p> <p>25 Pengawasan dan penertiban kegiatan kerakyatan yang berpotensi merusak lingkungan</p> <p>26 Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup</p> <p>27 Perlindungan dan konservasi sumber daya alam</p> <p>28 Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam</p> <p>29 Peningkatan pelayanan angkutan</p>	
--	--	--	---	--	--	--

					30 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	
					31 Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam	
					32 Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Lingkungan Hidup	